

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II Pengaturan Kewenangan Pembatalan Qanun dalam Peraturan Perundang-Undangan	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Qanun	18
B. Kedudukan dan Fungsi Qanun dan Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang Undangun Indonesia	21
C. Pengaturan Kewenangan Pembatalan Qanun dalam Peraturan Perundang-Undangun.....	27
BAB III. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU- XIV/2016 Terhadap Kewenangan Pembatalan Qanun Aceh	
A. Pengertian Putusan Mahkamah Konsitusi.....	40
B. Pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU- XIV/2016.....	50
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Pembatalan Qanun Aceh.....	61
BAB IV. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Wewenang Pemerintah dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.	
A. Jenis Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	74
B. Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah ...	82

	C. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Wewenang Pemerintah dalam Pembatalan Peraturan Daerah Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.....	93
BAB V	Kesimpulan dan Saran	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104